LAPORAN KINERJA TRIBULAN II
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaporan Kinerja Tribulan II Tahun 2019 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bentuk pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kendali serta memerlukan penyempurnaan. Hal ini juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dalam hal ini Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan salah satu Sub Bagian yang ada di Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
3. Menyiapkan bahan menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dinas;
4. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset;
5. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ditandatangani antara Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Kepala Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaianadalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan Sasaran Kinerja yaitu terlaksananya diklat paratur dan tersedianya sarana prasarana yang baik.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tribulan II tahun 2019:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Berdasarkan Program

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya diklat aparatur dan tersedianya sarana prasarana yang baik	prosentase sarpras dalam kondisi baik	100	74,17	-
	prosentase aparatur yang mengikuti diklat	100	70,18	-

Tabel 2.2
Cost per outcome Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Berdasarkan Program

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran s/d Tb.II *(dalam juta)*		Kinerja Tb.II (dalam prosen)		Efisiensi
1	Terlaksananya diklat aparatur dan tersedianya sarana prasarana yang baik	prosentase sarpras dalam kondisi baik	10622,18	668,8	100	7,5	
		prosentase aparatur yang mengikuti diklat	1219,82	642,9	100	74,99	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan melalui Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Tribulan II tahun 2019 telah melakukan beberapa kegiatan dalam 4 program yang diampunya, dan belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan, mengingat jadual pelaksanaan terbagi menjadi 4 tribulan.

Evaluasi dan analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN KINERJA:

Terlaksananya diklat aparatur dan tersedianya sarana prasarana yang baik

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Tribulan II Tahun 2019 tersebut juga ditemui beberapa hambatan antara lain:

1. Pos penganggaran untuk penyediaan instalasi air bersih/PDAM bagi kebutuhan Bappeda harus dialihkan, namun menunggu mekanisme PAK.
2. Pengakuan belanja modal pada pos belanja habis pakai (ATK) belum ada kejelasan, namun langkah paling mungkin yang bisa dilakukan dengan menunggu mekanisme PAK.
3. Terdapat pos pengadaan penyediaan software yang melekat pada pengadaan peralatan kantor nilai per satuannya lebih rendah dari harga pembelian sehingga tidak dapat dieksekusi.
4. Terdapat pos belanja perjalanan dinas luar negeri yang belum bisa dieksekusi.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Terkait dengan hambatan-hamabatan tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian telah melakukan beberapa langkah:

1. Menyampaikan kepada atasan langsung terkait permasalahan tersebut dan berinisiatif melakukan komunikasi dengan pihak anggaran, sehingga mekanisme

menjadi satu-satunya alternatif penyelesaian untuk point 1 dan 2 faktor penyebab kegagalan/keberhasilan diatas, demikian halnya dengan point 3.

2. Melaporkan kepada atasan langsung terkait kendala tersebut hasil komunikasi dengan pihak pejabat pengadaan, pengelola barang dan pemegang asset pemda untuk mendapatkan masukan terkait permasalahan tersebut (point 2), sehingga menunggu mekanisme PAK.
3. Terkait dengan point 4 sudah dikoordinasikan dengan penganggaran dan menunggu tindak lanjutnya.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan sudah baik

☐ Laporan diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain ……

……

……

……

……

……

……

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2019 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Pencapaian sasaran yang diperjanjikan belum tercapai 100 % disebabkan oleh beberapa kendala dan masih terdapat penjadwalan kegiatan juga pada tribulan III dan IV pada tahun 2019;
3. Perhatikan yang ekstra dan melaksanakan rekomendasi atasan langsung, serta wajib melaporkan setiap perkembangan yang terjadi agar diperoleh langkah pemecahannya dapat segera diupayakan.

Pasuruan, 30 Juni 2019

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

SEKRETARIS BAPPEDA
KABUPATEN PASURUAN

Ir. DJOKO PURWANTO, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196105161987031005

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

ARIK MAWANTO, SE
Penata (III/c)
NIP. 197303161998091001

LAPORAN KINERJA PEJABAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TRIBULAN II



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2019